

**RASIONALITAS MEMILIH MASYARAKAT KECAMATAN LINGGO  
SARI BAGANTI DALAM PEMILUKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2010 DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**Oleh**

**DAYTO PLESAR  
BP. 06993021**



**JURUSAN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2011**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perilaku memilih adalah kegiatan yang dilakukan seorang pemilih dalam menetapkan pilihannya dan memberikan suaranya dalam pemilihan umum. Berbicara tentang perilaku memilih tidak terlepas dari lima pendekatan yaitu, pendekatan struktural, sosiologis, ekologis, psikologis sosial, dan pilihan rasional (Surbakti, 1992:145). Satu-satunya yang menarik untuk dilihat dalam penelitian ini adalah pendekatan rasional, ini karena pendekatan rasional berkaitan erat dengan ekonomi masyarakat, yang menjelaskan bahwa perilaku memilih individu terkait dengan pertimbangan apa yang diperolehnya jika ikut memberikan suara pada pemilu presiden dan wakil presiden maupun pemilukada gubernur, walikota dan bupati. Dan, jelas bahwa keputusan untuk memberikan dukungan suara tidak akan terjadi apabila tidak terdapat loyalitas pemilih kepada kandidat tertentu. Begitu juga sebaliknya, pemilih tidak akan memberikan suaranya kalau mereka menganggap bahwa suatu kandidat tidak loyal serta tidak konsisten terhadap janji dan harapan yang telah mereka berikan. Jadi, konsep loyalitas di sini harus dilihat dari dua arah yaitu, dari konstituen kepada kandidat dan dari kandidat ke konstituen. Ini sangat beralasan karena pemilih lebih cenderung akan memilih kandidat yang menawarkan solusi yang paling menarik untuk menyelesaikan persoalan ekonomi seperti pengangguran, kesejahteraan sosial, pendidikan,

pendapatan dan lain-lain. Selain itu, tanggung jawab politik akan permasalahan di daerah kemudian juga menjadi pertimbangan pemilih untuk menentukan sikap.

Sejalan dengan itu, Anthony Downs dalam Roth (2008), menjelaskan bahwa pemilih yang rasional hanya menuruti kepentingannya sendiri atau walaupun tidak, akan senantiasa mendahulukan kepentingannya sendiri di atas kepentingan orang lain. Manusia bertindak egois, terutama oleh karena mereka ingin mengoptimalkan kesejahteraan material mereka, yakni pemasukan atau harta benda mereka. Jika hal ini diterapkan dalam perilaku pemilu, maka ini berarti bahwa pemilih yang rasional akan memilih calon yang paling menjanjikan keuntungan bagi dirinya. Pemilih tidak terlalu tertarik pada konsep politis calon tersebut, melainkan pada keuntungan terbesar yang dapat ia peroleh apabila calon ini menduduki pemerintahan dibandingkan calon lain (Dalam Roth, 2008:49). Dengan kata lain, kandidat yang akan dipilih adalah kandidat yang menawarkan keuntungan terbesar apabila kandidat tersebut berkuasa nantinya.

Lebih lanjut Downs menjelaskan, seorang pemilih umumnya tidak memiliki informasi yang baik di bidang politik oleh karena hasil yang diperoleh dari informasi tersebut biasanya tidak setimbang dengan pengorbanan yang diberikan, sehingga bagi mereka tidaklah rasional. Oleh karena itu banyak pemilih tidak berusaha untuk mengetahui “pandangan sesungguhnya” untuk kemudian dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan kepentingan mereka (Dalam Roth, 2008:50).

Lain lagi dengan Key (1966) yang melihat kecenderungan masing-masing pemilih menetapkan pilihannya secara *retrospektif*, yaitu dengan menilai apakah

kinerja partai yang menjalankan pemerintahan pada periode legislatif terakhir sudah baik bagi dirinya sendiri dan bagi negara, atau justru sebaliknya. Penilaian ini juga dipengaruhi oleh penilaian terhadap pemerintah dimasa yang lampau. Apabila hasil penilaian kinerja pemerintahan yang berkuasa (bila dibandingkan dengan pendahulunya) positif, maka mereka akan dipilih kembali. Apabila hasil penilaiannya negatif, maka pemerintahan tidak akan dipilih kembali (Dalam Roth, 2008:48).

Dasar pemikiran Key dan Downs dikembangkan lebih lanjut oleh Morris Fiorina (1981) dalam model keputusan pemilu *retrospektif*. Dalam model ini tampak bahwa teori perilaku memilih yang rasional dan pendekatan sosial psikologis untuk menjelaskan perilaku memilih dapat dikombinasikan dengan baik. Dasar pemikiran Fiorina tidak hanya mempertimbangkan pemilihan yang *retrospektif* dan *prospektif*, namun juga konstruksi identifikasi partai yang merupakan jantung model *Ann-Arbor*. Apa yang disebutkan terakhir dirancang sebagai elemen yang sangat tergantung kepada pengaruh *retrospektif*, yang banyak mengalami perubahan melalui pengalaman politis baru. Oleh karena itu, Fiorina tidak hanya membedakan antara masa lalu dan masa depan dalam komponen *rational choice* (pilihan rasional), melainkan membagi ke dalam masa lalu dan masa sekarang (Dalam Roth, 2008:51-52). Pemilih yang rasional dapat melihat secara subyektif dari masa pemerintahan yang lalu dan sekarang, dengan cara melihat kinerja pemerintahan yang lalu dengan pemerintahan yang sekarang berjalan, sehingga pemilih dapat menentukan pilihannya.

Kecenderungan di atas juga dapat dilihat dalam perilaku memilih masyarakat di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, misalnya pemilih di Sumatera Barat ternyata tidak menentukan pilihannya berdasarkan faktor-faktor sosiologis, ini terbukti pada pemilihan calon anggota legislatif pada pemilu 2009 yang lalu, dimana ikatan etnik dan budaya tidak menjadi faktor penentu terpilihnya kandidat yang diusulkan oleh partai politik (Asrinaldi, 2010). Pemilih rasional juga dapat dilihat pada pilkada gubernur tahun 2005 yang lalu, kemenangan Gamawan Fauzi yang berpasangan dengan Marlis Rahman lebih dikarenakan sosok Gamawan yang dikenal karena menerapkan *good governance* dengan penyederhanaan pelayanan publik saat menjadi Bupati Solok (Andi Saputra, 2010). Pemilih di Sumatera Barat dapat diasumsikan sebagai pemilih yang rasional, karena pemilih yang rasional menumpukan pilihannya pada pertimbangan rasional, terutama keuntungan apa yang mereka dapatkan dan meminimumkan ketidakpastian akibat pilihan yang dilakukannya.

Kecenderungan perilaku memilih di Sumatera Barat ini, juga terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya Kecamatan Linggo Sari Baganti pada saat pemilihan umum kepala daerah secara langsung. Pemilihan umum kepala daerah secara langsung diatur pada Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pada Bab IV tentang penyelenggaraan pemerintahan bagian kedelapan, yang terdiri dari 63 pasal (mulai pasal 56 sampai dengan pasal 119) atau hampir 25% dari keseluruhan isi UU. Pemilihan kepala daerah langsung pada gilirannya akan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat di daerah untuk memilih dan menentukan pemimpinnya sendiri tanpa adanya intervensi dari

siapa pun, termasuk Pemerintah Pusat atau elit-elit Politik ditingkat pusat. Pemilihan kepala daerah secara langsung juga dapat diartikan sebagai latihan kepemimpinan bagi elit-elit lokal daerah dalam mengembangkan kecakapannya, serta membangun komunikasi politik dengan masyarakat dan melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat.

Pemilihan kepala daerah langsung pertama kali telah diselenggarakan sejak Juni 2005 sampai April 2006 pada 230 daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Indonesia. Seperti halnya provinsi-provinsi lain, provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2005, yang kemudian diikuti oleh daerah kabupaten dan kota yang melaksanakan pemilihan bupati dan walikota untuk pertama kalinya secara langsung.

Di Sumatera Barat yang juga melaksanakan pilkada secara langsung pada tahun 2005 adalah Kabupaten Pesisir Selatan. Pemilihan kepala daerah secara langsung di Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2005 dengan suara sah sebanyak 187.835 suara dari 277.281 pemilih. Pemilihan ini dilakukan serentak diberbagai daerah di Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Pesisir Selatan dengan hasil pasangan Nasrul Abit dan Syafrizal yang diusung oleh Partai Amanat Nasional terpilih menjadi pemenang dan terpilih sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati periode 2005-2010. Untuk lebih jelasnya lagi berikut tabel hasil dari pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Pesisir Selatan:

Tabel 1.1 Jumlah hasil suara pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2005

No Urut	Pasangan Calon	Jumlah Suara	%
1	DR. Muhammad Yusril, SE, M.Si dan Bakri Bakar, SH	71.542	38,09%
2	Ir. H. Fahmi Asnan Kasry dan Evafauza Yuliasman Dt. Mangkuto Alam Tigo Lareh, SE, M.Si	14.087	7,50%
3	Ir. A. Rahim, SP dan Letkol Drs. H. Asmil Ilyas, MA	6.724	3,58%
4	Saidal Masfiyuddin, SH dan Drs. Faisal Syarif	22.744	12,11%
5	<b>Drs. H. Nasrul Abit dan Drs. Syafrizal</b>	<b>72.738</b>	<b>38,72%</b>
Jumlah Suara Sah		187.835	100%
Jumlah Pemilih		277.281	

Sumber : Data KPUD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005

Berdasarkan tabel di atas, dapat dicermati bahwa Nasrul Abit dan Syafrizal memenangkan hasil pilkada di Pesisir Selatan dengan jumlah suara 72.738 suara, yang kemudian diikuti oleh Muhammad Yusril dan Bakri Bakar dengan jumlah 71.542 suara. Dari hasil Pemilukada tahun 2005 di Pesisir Selatan, yang mana calon bupati dan wakil bupati yang terpilih dan di usung oleh Partai Amanat Nasional (PAN), memiliki perbedaan suara yang tipis, perbedaan jumlah suara tersebut berjumlah 1196 suara atau sebesar 0,63% suara.

Pada pemilukada tahun 2005, basis suara pasangan Nasrul Abit dan Syafrizal berada di Kecamatan Linggo Sari Baganti. Di kecamatan ini, pasangan Nasrul Abit memperoleh suara sebesar 17.182 suara atau 80,4%. Untuk lebih jelasnya lagi, berikut daftar tabel rekapitulasi hasil perhitungan suara pada

pemilukada tahun 2005 yang memilih pasangan Nasrul Abit dan Syafrizal per kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 1.2 Rekapitulasi perhitungan suara pasangan Nasrul Abit dan Syafrizal

Kecamatan	Jumlah Suara	Persentase Memilih Nasrul Abit
Lunang Silaut	5.210	42,4%
Basa IV Balai Tapan	3.806	38,1%
Pancung Soal	4.148	27,2%
<b>Linggo Sari Baganti</b>	<b>17.182</b>	<b>80,4%</b>
Ranah Pesisir	10.537	75,8%
Lengayang	7.565	37,4%
Sutera	5.762	3,1%
Batang Kapas	3.021	22,3%
IV Jurai	8.100	41,8%
Bayang	3.627	21,8%
Bayang Utara	1.091	29,1%
Tarusan	2.689	11,6%
Jumlah	72.738	

Sumber: Data KPUD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005

Pada tanggal 30 Juni 2010 telah dilaksanakan pemilihan umum kepala daerah secara langsung di Kabupaten Pesisir Selatan untuk kedua kalinya. Pemilihan ini dilakukan serentak diberbagai daerah di kabupaten/kota yang ada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dengan 12 “dapil” dan lima pasangan Bupati dan Wakil Bupati.<sup>1</sup> Menariknya, Nasrul Abit juga memenangkan pemilukada ini secara signifikan di Kecamatan Linggo Sari Baganti secara umum. Untuk lebih jelasnya lagi berikut daftar hasil pemilukada pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010.

<sup>1</sup> Dapil yang dimaksud oleh penulis adalah daerah pemilihan, yang mana tiap dapil telah didata orang-orang yang telah mendapat hak pilihnya di pemilu kepala daerah, yang terdiri dari 12 Kecamatan yaitu: Koto XI Tarusan, Bayang dan Bayang Utara, IV Jurai dan Batang Kapas, Sutera dan Lengayang, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti, Pancung Soal, Basa IV Balai Tapan dan Lunang Silaut.



Tabel 1.3 Jumlah hasil suara pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010

No Urut	Pasangan Calon	Jumlah Suara	%
1	H. Akmal Nesal, SH dan Dra. Hj. Marlina Amri Sata	7.770	4
2	<b>Drs. H. Nasrul Abit dan Drs. Editia Warman, M. SI</b>	<b>66.302</b>	<b>33</b>
3	Drs. H.Syafrizal, MM Dt. Nan Batuah dan Saidal Maspiyuddin, SH	55.539	28
4	Drs. Hasdanil Hasan, M.SI dan H.Mukhrizal, SH	11.587	6
5	Bakri Bakar dan Risnaldi	57.243	29
Jumlah Suara Sah		198.441	100%
Jumlah Pemilih		297.592	

Sumber : Data KPUD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa masyarakat cenderung memilih Nasrul Abit dan Editia Warman yang di usung Partai Demokrat, PAN, PKS dan Gerindra dengan perolehan suara sebanyak 66.302 suara. Pada pemilu kada tahun 2010 ini, basis suara pasangan Nasrul Abit (*incumbent*) dan Editia Warman tetap berada di Kecamatan Linggo Sari Baganti. Di Kecamatan Linggo Sari Baganti, pasangan Nasrul Abit (*incumbent*) dan Editia Warman memperoleh suara sebesar 18.013 suara atau 86% naik 831 atau 5% suara pada pemilukada tahun 2010 ini.

Untuk lebih jelasnya lagi, berikut daftar tabel rekapitulasi hasil perhitungan suara pada pemilukada tahun 2010 yang memilih pasangan Nasrul Abit dan Editia Warman per kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan:

Tabel 1.4 Rekapitulasi perhitungan suara pasangan  
Nasrul Abit dan Editia Warman Tahun 2010

Kecamatan	Jumlah Suara	Persentase Memilih Nasrul Abit
Lunang Silaut	4.681	32,8%
Basa IV Balai Tapan	1.368	13,3 %
Pancung Soal	2.119	11,3%
<b>Linggo Sari Baganti</b>	<b>18.013</b>	<b>86%</b>
Ranah Pesisir	10.067	71,3%
Lengayang	11.230	46,8%
Sutera	3.911	19,4%
Batang Kapas	2.814	21,9%
IV Jurai	4.552	21,1%
Bayang	2.730	15,4%
Bayang Utara	889	25,5%
Tarusan	3.928	18,8%
<b>Jumlah</b>	<b>66.302</b>	

Sumber: Data KPUD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010

Pertanyaannya, mengapa dukungan pemilih di kecamatan ini tetap diberikan kepada Nasrul Abit? sesuai dengan hipotesis penelitian ini, kemenangan Nasrul Abit ini terkait dengan rasionalitas pemilih yang melihat keberhasilan kepemimpinan Nasrul Abit pada periode 2005-2010 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Indeks*)<sup>2</sup> yaitu, pengukuran perbandingan dari angka harapan hidup, melek huruf (pendidikan) dan standar hidup (pendapatan perkapita)<sup>3</sup> di daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang meningkat secara signifikan

<sup>2</sup> <http://www.Shalimow.com/etcetera/human-development-index-Indonesia.html> (di akses pada 16-12-2010 jam 14.00 WIB)

<sup>3</sup> *Human Development Index* digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara atau daerah tersebut maju, berkembang atau terbelakang. Pengertian *Human Development Index* adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf (pendidikan) dan standar hidup (pendapatan perkapita). Salah satu cara untuk mengukur kondisi pembangunan manusia di negara atau daerah dapat dilihat dari indikator yang digunakan dalam *Human Development Index* (index pembangunan manusia), meliputi tiga dimensi dasar yaitu :

1. Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran.

dari tahun-ketahun seperti tabel berikut:

Tabel 1.5 Angka harapan hidup di Kabupaten Pesisir Selatan

Keterangan	Tahun				
	2005	2006	2007	2008	2009
Angka Harapan Hidup	65,13 tahun	64,8 tahun	65,3 tahun	65,2 tahun	68,45 tahun

Sumber: Diolah dari data BPS Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2009

Tabel 1.6 Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Tahun									
	2004		2005		2006		2007		2008	
	Jmlh Pddk	%	Jmlh Pddk	%	Jmlh Pddk	%	Jmlh Pddk	%	Jmlh Pddk	%
Tidak/ belum pernah sekolah	14.925	4,49	9.936	2,96	24.002	7,03	13.960	4,09	13.385	3,96
Tidak/ belum tamat SD	121.760	36,63	109.272	32,51	126.222	36,97	103.250	30,25	100.038	29,59
SD	94.104	28,31	95.357	28,37	80.609	23,61	98.301	28,80	82.969	24,54
SMP	51.755	15,57	61.834	18,40	51.179	14,99	57.001	16,70	64.744	19,15
SMA	42.315	12,73	50.884	15,14	50.120	14,68	56.523	16,56	63.041	18,65
DI/ Universitas	7.547	2,27	8.860	2,64	98.287	2,72	12.287	3,06	13.888	4,11
Jumlah	332.406	100%	336.143	100%	341.419	100%	341.322	100%	338.065	100%

Sumber : Diolah dari data BPS Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2004-2008

2. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis (pendidikan).
3. Standar kehidupan yang layak diukur dengan GDP perkapita.

Tabel 1.7 Jumlah pengangguran di Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun	Persentase
2005	9,63%
2006	9,40%
2007	9,16%
2008	8,92 %
2009	8,68 %

Sumber: RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 (hlm: 103)

Tabel 1.8 Jumlah keluarga miskin di Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
2006	41.414	161.515
2007	38.480	150.072
2008	30.649	119.531
2009	29.117	113.556

Sumber: RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 (hlm: 91)

Tabel 1.9 Pendapatan perkapita di Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun	Jumlah
2005	3.087.490
2006	5.712.410
2007	6.428.570
2008	7.308.326
2009	8.308.505

Sumber: RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 (hlm: 29)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa angka harapan hidup manusia di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan. Misalnya pada tahun 2005, angka harapan hidup manusia berada pada 65,13 tahun, 64,8 tahun pada 2006, 65,3 tahun pada 2007, 65,2 tahun pada 2008 dan pada tahun 2009 mengalami

peningkatan menjadi 68,45 tahun. Dari angka-angka tersebut, maka pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan serius dalam meningkatkan kesehatan. Karena kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi oleh setiap manusia karena selain dapat berkontribusi kepada kecerdasan juga penting untuk meningkatkan produktivitas kerja masyarakat.

Dari segi lain, tingkat pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan masih rendah. Pada tahun 2004 jumlah yang belum/tidak pernah sekolah berjumlah 14.925 orang. Pada tahun 2005 mengalami penurunan, yang mana belum/tidak pernah sekolah berjumlah 9.936 orang. Namun pada tahun 2006, jumlah yang belum/tidak pernah sekolah mengalami peningkatan menjadi 24.002 orang, namun pada tahun 2007 kembali mengalami penurunan 13.960 orang dan pada tahun 2008 menjadi 13.385 orang. Peningkatan mutu pendidikan harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan pada kemampuan dalam baca tulis dan keterampilan dasar yang berguna bagi kehidupan. Karena pendidikan adalah modal sangat besar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan masalah yang lain adalah jumlah pengangguran, dimana pertumbuhan jumlah angkatan kerja tidak seimbang dengan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja, baik yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi daerah, maupun sebagai akibat tekanan makro ekonomi secara nasional. Rata-rata jumlah pengangguran di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2005-2009 mengalami penurunan sebesar 0,23-0,24 % pertahun.

Begitu juga dengan jumlah keluarga miskin di Kabupaten Pesisir Selatan juga mengalami penurunan dari tahun 2006 sampai 2009. Pada tahun 2007 angka

kemiskinan mengalami penurunan sebesar 7,1% (150.072 orang) dari tahun 2006 (161.515 orang), tahun 2008 menurun secara drastis sebesar 20,3% (119.531 orang), dan tahun 2009 angka kemiskinan menurun sebesar 5% (113.556 orang). Fakta lain yang fenomenal adalah pendapatan perkapita Kabupaten Pesisir Selatan yang tiap tahun mengalami kenaikan dari tahun 2005-2009. Pada tahun 2005, pendapatan perkapita Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp 3.087.490 dan pada tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi Rp 8.308.505. Kinerja pemerintahan dalam meningkatkan pembangunan manusia sudah cukup berjalan, hal ini dapat dilihat dari indikator *Human Development Indexs*, yang mana jika harapan hidup, tingkat pendidikan, pendapatan perkapita mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Dari data di atas terlihat bahwa angka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pesisir Selatan meningkat. Jelas kecenderungan ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah Kabupaten pesisir Selatan dapat melaksanakan fungsi dengan baik, terutama untuk memajukan taraf pembangunan manusia. Kemenangan Nasrul Abit dan Editia Warman di Kabupaten Pesisir Selatan pada pemiluakada, khususnya di Kecamatan Linggo Sari Baganti tidak lepas dari faktor yaitu, program kerja pada periode pertama kepemimpinan Nasrul Abit.

Bupati yang terpilih untuk kedua kalinya ini, dalam periode pertama memimpin (Nasrul Abit) Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan perubahan dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan kesehatan (harapan hidup), meningkatkan mutu pendidikan dan pendapatan perkapita di Kabupaten Pesisir Selatan, masalah tersebut merupakan masalah klasik dalam

proses kemajuan pembangunan di setiap daerah. Masalah tersebut merujuk pada masalah kemiskinan. Kemiskinan berkaitan dengan masalah deprivasi sosial, akses ke sumber daya seperti air, tempat tinggal, layanan kesehatan dan sanitasi, pengangguran, pendidikan, pendapatan serta transportasi. Akar masalah kemiskinan adalah ketergantungan, isolasi, ketidakberdayaan (*vulnerability*) dan rendahnya harapan hidup. Oleh karena itu kemiskinan mempunyai banyak sisi yaitu, ekonomi, sosial dan politik (Dalam Pattinama, 2009).<sup>4</sup>

Berdasarkan realita menguatnya pemilih rasional inilah maka peneliti ingin melihat rasionalitas memilih masyarakat dalam pemilu pada tahun 2010 di Kecamatan Linggo Sari Baganti di Kabupaten Pesisir Selatan. Rasionalitas memilih masyarakat di Kecamatan Linggo Sari Baganti dilihat tiga teori yang dipakai dalam penelitian ini. Ketiga teori tersebut masing-masing menjelaskan bahwa pemilih yang rasional dapat memilih dari keuntungan yang diperoleh pemilih, penilaian terhadap pemerintahan sebelumnya dan penilaian terhadap kemampuan kontestan.

---

<sup>4</sup> Harris-White (2005) sebagaimana dalam Pattinama (2009) menjelaskan bahwa, secara ekonomi penduduk miskin tidak memiliki apa-apa (*having nothing*), secara sosial mereka tidak menjadi siapa-siapa (*being nothing*), dan secara politik mereka tidak memperoleh hak kecuali korban pembangunan (*having no rights and being wrong*).

## **BAB VII**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan penjelasan bab terdahulu, baik dalam kerangka teoritis, pendeskripsian, uji korelasi Kendall Tau maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

Rasionalitas memilih masyarakat Kecamatan Linggo Sari Baganti dalam pemilukada bupati dan wakil bupati tahun 2010 di Kabupaten Pesisir Selatan adalah analisis mengenai perilaku memilih yang dilihat dari keuntungan yang diperoleh pemilih, penilaian terhadap pemerintahan sebelumnya dan kemampuan kontestan terhadap pemilih yang memilih pada pemilukada tahun 2010 di Kabupaten Pesisir Selatan.

Keuntungan yang diperoleh pemilih pada penelitian ini masuk dalam kategori rendah, meskipun responden memilih karena adanya keuntungan yang ditawarkan, namun responden dalam penelitian tidak menerima keuntungan yang bersifat materi (mendapatkan bantuan sembako dan uang), namun responden lebih banyak memilih keuntungan yang bersifat non materi (meningkatkan kesejahteraan, membuka lapangan kerja baru, memajukan pembangunan, layanan kesehatan yang layak dan pendidikan gratis).

Sementara untuk variabel penilaian terhadap pemerintahan sebelumnya, juga menunjukkan hasil yang sama dengan variabel keuntungan yang diperoleh pemilih. Penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap pemerintahan



sebelumnya mempengaruhi pemilih dapat menentukan apakah pemerintahan yang lalu dapat terpilih kembali atau tidak.

Terakhir, variabel penilaian terhadap kemampuan kontestan, menunjukkan hasil yang berbeda dari variabel keuntungan yang diperoleh pemilih dan penilaian terhadap pemerintahan sebelumnya. Responden menilai bahwa kemampuan kontestan bukan hanya dinilai dari kinerja pada pemerintahan yang lalu, melainkan penilaian responden bahwa pemerintahan yang sekarang berkuasa kembali, akan lebih baik lagi dari pemerintahan yang lalu.

Secara keseluruhan semua variabel yang dipakai dalam penelitian ini memberikan korelasi yang positif, yang berarti semakin tinggi nilai variabel X (keuntungan yang diperoleh pemilih, penilaian terhadap pemerintahan sebelumnya dan penilaian terhadap kemampuan kontestan), maka semakin rasional seorang pemilih dalam menentukan kemenangan pasangan Nasrul Abit dan Editia Warman dalam pemilukada bupati dan wakil bupati tahun 2010 di Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan. Namun untuk pengaruh terbesar ada pada variabel penilaian terhadap kemampuan kontestan, keuntungan yang didapat pemilih di tempat kedua dan penilaian terhadap pemerintahan sebelumnya pada posisi ketiga.

Jawaban dari tujuan dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh yang sama yaitu, adanya pengaruh keuntungan yang diperoleh pemilih, penilaian terhadap pemerintahan sebelumnya dan penilaian kemampuan kontestan terhadap kemenangan pasangan Nasrul Abit dan Editia Warman pada pemilukada bupati dan wakil bupati tahun 2010 di Kabupaten Pesisir Selatan. Meskipun dari hasil uji

Kendall Tau pada tujuan penelitian pertama dan kedua hanya menunjukkan hubungan positif yang tidak berarti, yang artinya, hubungan variabel tersebut saling berhubungan, namun hubungan antara variabel tersebut tidak kuat dan tujuan ketiga menunjukkan hubungan positif yang sedang, yang artinya, hubungan variabel tersebut saling berhubungan, namun hubungan variabel tersebut memiliki hubungan yang tidak terlalu kuat (sedang).

Jadi, kesimpulannya adalah rasionalitas memilih dalam realitanya memiliki sifat khas sendiri dan tidak dapat diramalkan dengan tepat sebelumnya. Dengan kondisi keterbatasan dari sisi pendidikan, perekonomian, kurangnya pengetahuan pemilih terhadap program kerja pemerintahan, kinerja pemerintahan, visi dan misi dari kandidat, menyulitkan pemilih untuk memberikan pertimbangan yang rasional atau evaluasi terhadap calon pemimpin yang ditawarkan kandidat, akibatnya, pilihan mereka bukanlah pilihan rasional.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Afan Gaffar. 1992. *Javanese Voters: A Case Study Of Election Under A Hegemonis Party System*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Andi Saputra. 2010. *Peran Pemilih Tradisional Dalam Pemilu Kada Gubernur Sumbar 2010*, (online), ([http://blog.Unand.ac.id/Andi Saputra/](http://blog.Unand.ac.id/Andi_Saputra/)), diakses 26 Desember 2010.
- Asrinaldi, dkk. 2003. "Political Response: Kaum Miskin Perkotaan 1999-2004: Kajian Tentang Preferensi Politik, Identifikasi Kepartaian, Dan Perilaku Memilih (Kasus Di Tiga Kota, Padang, Medan, dan Pekanbaru)". *Laporan penelitian* tidak dipublikasikan. Padang: Lembaga Penelitian Universitas Andalas.
- \_\_\_\_\_. 2010. 14 Maret. "Perilaku Memilih Masyarakat Sumatera Barat". Padang Ekspres, hlm 4.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Pemilih Rasional dan Pemimpin Berkualitas*, (online), (<http://els.bappenas.go.id/>), diakses 26 Desember 2010.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Grasindo.
- BPS. 2004. *Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka 2004*. Painan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka 2005*. Painan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka 2006*. Painan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka 2007*. Painan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka 2008*. Painan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka 2009*. Painan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan.
- Dieter, Roth. 2008. *Studi Pemilu Empiris, Sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode*. Jakarta: Friedrich-Nauman-Stiftung Die Freiheit.
- Firmanzah. 2007. *Marketing Politik, Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Fredo Permana. 2007. "Perilaku Memilih Mahasiswa Universitas Andalas dan Universitas Bung Hatta dalam Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Langsung Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Tahun 2005". *Skripsi* tidak dipublikasikan, Padang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
- Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt. (Eds). 1999. *Sosiologi*. Jakarta: IKAPI.
- <http://www.xa.yimg.com> (diakses 24 Mei 2011).
- <http://www.Shalimow.com/etcetera/human-development-index-Indonesia.html> (diakses 16 Desember 2010).
- <http://Gorontalo-www.taminmunablogspotcom.blogspot.com/2010/04/partisipasi-politik.html> (diakses 24 Mei 2010).
- Imam Subawi. 2009. *Perilaku Memilih Jelang Pemilu 2009*, (online), (<http://Imamlirboyo.blogdetik.com>), diakses pada 2 Mei 2011.
- Joko J Prihatmoko. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Semarang: Pustaka Pelajar.
- KPUD Pessel. 2005. *Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2005*. Painan: Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- \_\_\_\_\_ 2009. *Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009*. Painan: Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- \_\_\_\_\_ 2010. *Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010*. Painan: Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- \_\_\_\_\_ 2010. *Jumlah Pemilih Dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010*. Painan: Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- \_\_\_\_\_ 2010. *Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010*. Painan: Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Josef Kristiadi. 1993. "Pemilu dan Perilaku Pemilih". *Disertasi* tidak dipublikasikan. Jogjakarta: Program Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada.
- Lembaga Survei Indonesia. 2009. *Rasionalitas Pemilih: Kontestasi Partai Menjelang Pemilu 2009*, (online), (<http://LSI.or.id>), diakses 26 Desember 2010.
- Marcus J. Pattinama. 2009. *Pengentasan Kemiskinan Dengan Kearifan Local (Studi Kasus Di Pulau Buru-Maluku Dan Surade-Jawa Barat)*, (online), (<http://wordpress.co.id>), diakses 26 Desember 2010.

- Masri Singarimbun & Sofyan Efendi (Edt). 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Muhammad Sholihin. 2009. *Perilaku Memilih Buruh Rokok Dalam Pemilukada Langsung Di Kabupaten Kudus*. Tesis. Semarang: Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, (online), (<http://Undip.ac.id/>), diakses 24 April 2011.
- Pemda. 2006-2009. *Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2006-2010*. Painan: Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Nota Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2009 Kepada DPRD Kabupaten Pesisir Selatan*. Painan: Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Peraturan Lengkap Pilkada. 2006. *Peraturan RI Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Penegasan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah*. Jakarta: Redaksi Sinar Grafika.
- Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- RatihWirdaningsih. 2007. "Voting Bahviour Masyarakat Dalam Pilkada Gubernur tahun 2005 di Kota Padang". *Skripsi* tidak dipublikasikan. Padang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
- RKPD. 2011. *Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011*. Painan: BAPPEDA Kabupaten Pesisir Selatan.
- Sugiyono. 2006. *Statistik Untuk Penelitian*. Jawa Barat: IKAPI.
- Sunny Tanuwidjaja. 2008. *Mitos Pemilih Rasional*. Suara Pembaruan, (online), (<http://www.csis.or.id/>), diakses 26 April 2011.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. 2004. (online), (<http://Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.co.id>), diakses 12 September 2010.